

**PRAKTEK MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KARAMA KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA**

TAHUN 2020

SKRIPSI



Oleh :

Annisa Gusti Erliana

E11115014

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPERTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PRAKTEK MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KARAMA
KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020

Di susun dan diajukan oleh

ANNISA GUSTI ERLIANA

E 111 15 014

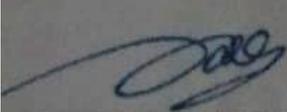
Akan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

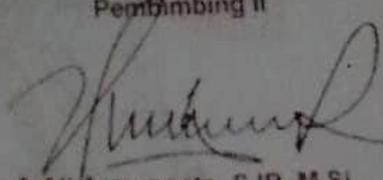
Pada tanggal

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H.A. Yakub, M.Si, Ph. D.
NIP. 196212311990031023


A.All Armunanto, S.IP, M.Si
NIP. 19801114 200812 1003

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H.A. Yakub, M.Si, Ph. D.
NIP. 196212311990031023

LEMBAR PENERIMAAN
SKRIPSI
PRAKTEK MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KARAMA KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2020

Di susun dan diajukan oleh :

ANNISA GUSTI ERLIANA

E 111 15 014

dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Drs.H.A.Yakub, M.Si, Ph.D
Sekretaris : A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si
Anggota : Dr. Ariana, S.IP., M.Si
Anggota : Haryanto, S.IP, M.A



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Gusti Erliana

Nim : E11115014

Jenjang pendidikan : Strata-1 (S1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Praktek money politic pada pemilihan kepala desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Tahun 2020**" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau melakukan kutipan tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

akassar, 26 Februari 2021



(ANNISA GUSTI ERLIANA)

ABSTRAK

Annisa Gusti Erliana.NIM E111 15 014.Praktek Money Politic pada Pemilihan Kepala Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Tahun 2020. Di Bawah Bimbingan H.A.Yakub dan A.Ali Armunanto.

Dalam praktek money politic pada pemilihan kepala desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba tahun 2020 Benar adanya praktek money politic di desa Karama karena sudah ada sejak dulu dan terjadi secara turun temurun Dari data itu ditemukan dua pola praktik money politic, yaitu yang pertama pola money politic berbentuk uang dan yang kedua berbentuk barang dan jasa.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana faktor-faktor terjadinya money politik pada pemilihan kepala desa tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan secara deskriptif dari data yang diperoleh faktor apa yang menjadi penyebab masyarakat melakukan money politic. Selain itu data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada responden.

Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya praktek money politic dalam pemilihan kepala desa di desa Karama yaitu faktor ekonomi, faktor tradisi atau kebiasaan serta kurangnya sosialisasi politik yang dilakukan pemerintah.

Kata Kunci : Money Politik, Pilkades, Tradisi

ABSTRACT

Annisa Gusti Erliana. NIM E111 15 014. Money Politic Practice in the Election of Karama Village Head, Rilau Ale District, Bulukumba Regency in 2020. Under H.A.Yakub and A.Ali Armunanto

In the practice of money politics in the election of the head of Karama village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency in 2020, it is true that the practice of money politics in Karama village has been around for a long time and has been passed down from generation to generation. in the form of money and the second in the form of goods and services.

This study aims to describe and analyze how the factors in the occurrence of money politics in the village head election. This study uses a qualitative descriptive method to explain descriptively from the data obtained what factors cause people to commit money politics. In addition, the data in this study were obtained from in-depth interviews with respondents.

The results of this study explain that the causes of the practice of money politics in village head elections in Karama village are economic factors, traditional or habitual factors and the lack of political socialization by the government.

Keywords: Money Politics, Pilkades, Tradition

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil a'alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“PRAKTEK MONEY POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KARAMA KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA”**. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan Rasulullah Muhammad SAW atas pelajaran berharganya tentang pentingnya sabar dan tak kenal menyerah di tengah banyaknya rintangan dalam penyelesaian tugas akhir ini. Kemudian tak lupa kedua orang tua penulis, Ayahanda Haeruna dan ibunda Hasmawati, S.ST yang senantiasa memberikan do'a, mencurahkan seluruh kasih sayang dan menjadi penyemangat bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan yang dikarenakan atas keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Penulis mengharapkan banyak kritik dan saran demi penyempurnaan tulisan ini kiranya kelak dapat bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu banyak rintangan, gangguan, dan ujian yang penulis hadapi selama menyusun skripsi ini hingga tahap ujian akhir. Namun berkat adanya bantuan dukungan, dorongan, do'a, serta semangat dari berbagai pihak yang mengiringi perjalanan penulis. Dan melalui kata pengantar ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk semua pihak tanpa terkecuali atas segala bantuannya.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini kepada:

- 1) Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin
- 2) Bapak **Prof. Dr. Armin, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
- 3) Bapak Drs. **H. A. Yakub, M.Si, P.hD** selaku ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- 4) Bapak **A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si** selaku sekretaris Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
- 5) Bapak **Drs. H. A. Yakub, M.Si. Ph.D**, selaku pembimbing I dan Bapak **A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si** selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai
- 6) Seluruh dosen pengajar **Prof. Basir Syam, M.Ag; Prof. Muhammad, M.Si; Prof. Dr. Armin. M.Si; Drs. H. A. Yakub, M.Si. Ph.D; A.Ali Armunanto, S.IP, M.Si; Dr.Imran. M.Si; Dr.Muhammad Saad, MA; Dr. Phil. Sukri, M.Si; Dr.ArianaYunus, S.IP, M.Si; Dr. Gustiana A. Kambo S.IP, M.Si; A.Naharuddin, S.IP, M.Si; Endang Sari S.IP, M.Si; Ummi Suci Fathiah B. S.IP, M.IP; Zulhajar, S.IP, M.Si; Haryanto, S.IP, M.A; dan Sakinah Nadir, S.IP, M.Si**, terima kasih atas pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini serta atas kuliah-kuliah inspiratifnya.
- 7) Seluruh **staf pegawai Departemen Ilmu Politik**, yang senantiasa memberikan arahan dalam pengurusan berkas
- 8) Keluarga Besar Himapol Fisip Unhas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan dorongannya selama penulis menjadi salah satu bagian dari Himapol, tanpa Himapol penulis tidak bisa seperti ini.
- 9) Saudara-saudaraku tercinta **DELEGASI 2015, Fichri, Rifan, Galank, Unil, Rahmat, Syarif, Dianto, Wahyu, Liza, Upi, Iin**,

Aswita, Siska, Susi, Joni, Ayu, Dika, Ningrat, Nindi, Afifah, Tias, Ubay, Dilla, Risma, Syifa, dan Fira

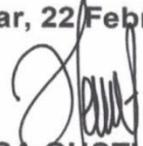
10) Kepada Sahabat SQR Inci, **Cica, Rhya, Umrah, Indra, Eril, Ana, Indah, Anto** terima kasih selalu memberikan support kepada penulis untuk terus semangat menyelesaikan skripsi, terima kasih telah mengajarkan arti kebersamaan.

11) Kepada Sahabat Anak Gajah, **Susi, Upi, Aswita, Siska, Iin, Liza** terima kasih sudah sudah setia menemani penulis selama MABA hingga sekarang, dan selalu memberikan semangat serta arahan-arahan yang berarti kepada penulis.

Terima kasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada para Informan atas segala waktu yang diluangkan serta atas keterbukaan kepada penulis, sehingga penulis memperoleh informasi yang penulis butuhkan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 22 Februari 2021


ANNISA GUSTI ERLIANA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendekatan Rasional.....	6
2.2 Teori Politik Patronase.....	8
2.3 Konsep Money Politic	16
2.4 Kerangka Konseptual.....	17
2.5 Skema Pikir.....	19

III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian.....	20
3.2 Jenis Data Penelitian	22
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.4 Teknik analisa data	24

IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Batasan Wilayah	27
.....	
4.2 Nama Dusun	29

V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Monepolitic.....	37
5.2 Penerimaan Masyarakat Terhadap Kegiatan Money Politic pada Pemilihan Kepala Desa Karama	42

VI KESIMPULAN DAN SARAN

48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum money politic diartikan sebagai seni untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan kekuasaan. Sedangkan uang politik hanya sebagai akses untuk memperoleh kemenangan tersebut. Sedangkan menurut Ismawan money politic diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu atau bisa dikatakan sebagai jual beli suara pada proses politik demokratisasi atau pemilihan umum seperti pemilihan tingkat nasional maupun pemilihan tingkat desa.¹

Secara umum money politic adalah suatu bentuk pemberian berupa uang, barang atau janji menyuap seseorang supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih salah seorang kandidat pada saat pemilihan umum. Money politic sebenarnya bertentangan dengan UU No 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat 3 yang menjelaskan bahwa siapapun pada waktu diselenggarakan pemilihan umum melakukan pemberian atau janji menyuap, akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun. Pidana dikenakan kepada yang memberi maupun yang diberi².

Fenomena money politic tidak hanya terjadi pada pemilihan umum ditingkat pusat maupun tingkat daerah saja tetapi juga terjadi pada tingkat pemilihan kepala desa. Menengok pada aspek kesejarahan pemilihan kepala desa di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak masa penjajahan. Bahkan sejak masa VOC (*Vereenigde Ostindische Compagnie*) di Indonesia pada waktu itu sudah diadakan pemilihan kepala desa secara langsung

¹ Mohamad Amanu, Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri), hal 7-8

²Darmawan, D. (2012, November). Pemilihan umum dan demokrasi. Jakarta Selatan. Diakses pada tanggal 23Agustus 2019 dari suarapublik.co.id/index/index.php?politik-uang. Hal.11.

oleh rakyat, walaupun yang dimaksud pemilih pada waktu itu hanyalah kalangan terbatas saja seperti kalangan elite desa maupun keturunan dari kepala desa yang sebelumnya.³ Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat dengan hanya diwakili oleh seorang kepala keluarga dari sebuah keluarga saja.

Pada pemilihan kepala desa inilah penduduk memilih melalui kepala keluarga sering menerima uang untuk memberikan suaranya dan adakalanya hal tersebut terkadang disebut juga sebagai zakat. Pada masa pasca reformasi ini money politic juga masih terjadi pada pemilihan kepala desa. Hari ini desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan tentang pemilihan Kepala Desa, Pasal 31 dijelaskan: (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota; (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1,2) diaturberdasarkan Peraturan Pemerintah.

Adanya aturan yang menjelaskan tentang pemilihan Kepala Desa ini, semakin memperkuat semangat untuk menerapkan demokratisasi diseluruh wilayah di Indonesia dan juga semangat dalam penyempurnaan otonomi daerah. Untuk memperkuat aturan tentang UU No.6 Tentang Desa

³Maschab, Mashuri. (2013). Politik pemerintahan desa di Indonesia.Yogyakarta: Polgov Universitas Gajahmada.Hal.28.

ini, maka lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.112 Tahun 2020 yang secara khusus mengatur tentang pemilihan Kepala Desa. Dalam Permendagri No.112 Tahun 2020 ini ada beberapa hal yang sangat penting untuk dipahami yaitu pada bagian BAB II mengenai proses pemilihan Kepala Desa, dan BAB III yaitu tahapan pelaksanaan pemilihan. Dalam BAB II tentang pemilihan Kepala Desa Pasal 2, 3, disebutkan: (2) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang; (3) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten atau kota.⁴

Namun penguatan demokratisasi ditingkat desa ini tidak sejalan dengan sosialisasi menyangkut Pendidikan politik di masyarakat. Hingga sampai hari ini praktik money politic sangat marak dilakukan oleh peserta pemilihan kepala desa dan praktik money politic. Praktik money politic ini telah menjadi hal biasa dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan perubahan perilaku memilih menjadi cenderung transaksional (jual-beli suara). Sebagai gambaran, temuan survei oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan makin permisifnya publik akan politik uang. Publik yang membenarkan politik uang mengalami peningkatan dari 11,9% di tahun 2005 menjadi 20.8% di tahun 2010⁵.

Hasil survei oleh Lembaga Pengkajian dan Survei Indonesia (LPSI) Semarang menunjukkan sebanyak 72 responden di Kota Semarang menyatakan wajar pemberian uang atau materi dari calon kepala daerah.⁶kecenderungan masyarakat sekarang lebih bersifat transaksional. Yang mana mereka (pemilih) akan meminta imbalan jika partai atau calon

⁴Rudiadi Dan Ratna Herawati, Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau), Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017, Hal 134-135

⁵Diakses pada laman Suaramerdeka.com, pada tanggal 24 Agustus 2019 pukul 18:32

⁶Diakses pada laman sentananews.com, 2015.pada tanggal 24 Agustus 2019 pukul 18:50

tertentu akan meminta suaranya.⁷ Seperti yang terjadi pada pemilihan kepala desa di kabupaten Bulukumba kecamatan Rilau Ale desa Karama pada tahun 2020.

Desa karama merupakan salah satu desa di Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Dimana pada pemilihan kepala desa yang dilakukan serentak pada tahun 2020 terdapat dua calon pertama Jusman kedua Andi Hariyanto. Pada pemilihan tersebut perolehan suara masing-masing kandidat yaitu, Jusman 994 orang, dan Andi Hariyanto 779 orang. Adapun faktor yang mempengaruhi banyaknya perolehan suara dari salah satu kandidat yaitu Jusman pada pemilihan kepala desa tahun 2020 di karenakan memiliki latar belakang yang peduli kepada sesama warga Desa Karama. Selain daripada itu terdapat faktor lain yang menjadi tolak ukur dari perolehan suara terbanyak yang diraih oleh kandidat tersebut yaitu modal popularitas.

Money politic yang dilakukan kedua calon menggunakan strategi yang berbeda dalam penyalurannya. Strategi yang dilakukan kandidat yang terpilih yaitu membentuk suatu tim yang terdiri dari beberapa tokoh masyarakat yang menjadi tim suksesnya dan tim suksesnyalah yang akan membagikan uangnya. Praktik money politic yang terjadi ini diterima oleh masyarakat tanpa adanya penolakan yang dibuktikan tidak adanya laporan menyangkut praktik money politic kepala penyelenggara pilkades.

Dari beberapa poin di atas yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini yaitu terkait adanya indikasi money politik yang dilakukan oleh kandidat terhadap masyarakat desa Karama dimana hal ini menjadi pertimbangan bagi penulis dalam menentukan judul “ **Praktek Money Politik Di Desa Karama Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020**”

⁷Fitriyah, CARA KERJA POLITIK UANG (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati), POLITIKA, Vol. 6, No.2, Oktober 2015, hal 101

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan penulis pada latar belakang, penulis mengangkat rumusan yakni menyangkut:

1. Bagaimana pola-pola money politic yang dilakukan para calon kepala desa Karama tahun 2020?
2. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kegiatan money politic pada pemilihan kepala desa Karama tahun 2020?

1.3. Tujuan Dan Manfaat penelitian

1.3.1.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana faktor-faktor terjadinya money politik pada pemilihan kepala desa tersebut.

1.3.2.Manfaat Penelitian

Manfaat akademik

- a) Sebagai bahan acuan para peneliti yang ingin meneliti terkait money politik dalam pemilihan kepala desa
- b) Memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan

Manfaat praktis

- a) Memberikan bahan rujukan pada masyarakat yang berminat dalam memahami money politik dalam proses pemilihan kepala desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan panduan penulis dalam aspek konseptual-teoritis. Pada bagian ini penulis akan paparkan berbagai konsep teori yang dijadikan sebagai alat analisis terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

2.1. Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung-rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dan alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang pemilihan kepala desa atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih. Di sini faktor kesadaran pemilih sangat berpengaruh. Dalam pendekatan ini sering melihat berdasarkan asumsi sederhana, yaitu setiap orang selalu mengutamakan self-interest.

Menurut Dan Nimmo, pemberi suara yang rasional pada hakikatnya adalah aksional diri, yaitu sifat yang intrinstik pada setiap karakter personal pemberi suara yang turut memutuskan pemberian suara pada kebanyakan warga negara.

Adapun orang yang berfikir rasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Selalu dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif
- b. Memilah alternatif-alternatif sehingga masing-masing apakah lebih disukai, sama saja atau lebih rendah bila dibandingkan dengan alternatif lain.

- c. Menyusun alternatif-alternatif dengan cara yang transitif, jika A lebih disukai daripada B, dan B daripada C, maka A lebih disukai daripada C.
- d. Selalu memilih alternatif yang peringkat preferensi lebih tinggi.
- e. Selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama dan bahwa pemberi suara rasional selalu dapat mengambil keputusan apabila dihadapkan dengan alternatif dengan memilah alternatif itu, yang lebih disukai, sama atau lebih rendah dari alternatif lain, menyusunnya dan kemudian memilih dari alternatif-alternatif tersebut yang tingkat preferensinya paling tinggi dan selalu mengambil keputusan yang sama apabila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama.⁸

2.1.1. Rasional Choice

Rational choice adalah sebuah pendekatan perilaku memilih yang merupakan kritik terhadap dua model pendekatan yang sudah ada yaitu pendekatan sosiologis dan psikologis. Ada kegelisahan ilmuwan melihat perubahan-perubahan perilaku memilih yang tidak bisa dijelaskan oleh dua pendekatan tersebut. Latar belakang teoritis untuk penjelasan pendekatan ini berangkat dari teori ekonomi.⁹

Model ini merupakan upaya untuk menjelaskan perilaku memilih yang berhubungan dengan parameter ekonomi politik. Premisnya sederhana, jika asumsi pilihan rasional mampu menjelaskan pasar, maka hal ini juga dapat menjelaskan fungsi politik. Operasi model ini didasarkan bahwa semua keputusan yang telah dibuat oleh pemilih bersifat rasional, yakni dipandu oleh kepentingan diri sendiri dan

⁸ Novella Putriasafa, Skripsi: *"Karakteristik Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2015"* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), Hal.22-23.

⁹ Haryanto, "kepangkitan party ID : Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 17, Nomor 3, Maret 2014. 295

diberlakukan sesuai dengan prinsip maksimalisasi manfaat. Pilihan politik pemilih yang rasional senantiasa berorientasi kepada hasil yang dicapai oleh partai atau kandidat tertentu dalam politik, baik hasil yang dipersepsikan maupun yang diantisipasi.

2.2. Teori Politik Patronase

Patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau penggiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka.¹⁰ Dengan demikian, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan, jabatan di suatu organisasi atau pemerintahan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/ komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara atau biasa dikenal money politics dan vote buying) atau dana-dana publik (misalnya, proyek-proyek pork barrel yang di biyai oleh pemerintah).

Dalam literatur Ilmu Politik, Pork barrel adalah salah satu bentuk dari politik distributif, dimana politisi (baik lembaga legislatif maupun eksekutif) berusaha untuk mengalokasikan sumber daya material dari negara kepada pendukungnya dalam kerangka mobilisasi dukungan elektoral. Para politisi berusaha mewujudkan program yang konkret kepada konstituennya dalam rangka terpilih kembali di pemilu berikutnya. Dari sisi yang lain, konstituen berusaha mendapatkan program material dari negara untuk memenuhi

¹⁰ Adji, Reka. Jurnal: PATRONASE DAN KLIENTALISME PADA PILKADA SERENTAK KOTA KENDARI TAHUN. Vol. 2, No. 1, Maret 2017: 33 - 45

kebutuhan mereka. Praktik ini sebenarnya berlangsung di banyak negara, termasuk negara-negara yang demokrasinya sudah mapan.¹¹

Pork barrel juga sering disebut sebagai politik distribusi (distributive politics) dapat di definisikan sebagai suatu bentuk penyaluran bantuan materi (sering dalam bentuk kontrak, hibah, atau proyek pekerjaan umum) ke kabupaten/ kota dari pejabat terpilih. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pork barrel berasosiasi dengan proyek-proyek pekerjaan publik seperti proyek perbaikan jalan, perbaikan fasilitas di sekitar sungai, dan perbaikan pelabuhan. Proyek-proyek perbaikan fasilitas publik tersebut sering dijadikan contoh klasik pork barrel yang disitir dalam banyak literatur kajian politik pork barrel. Hal ini bukan berarti bahwa pork barrel hanya mencakup proyek-proyek fisik berupa perbaikan fasilitas publik, tetapi pork barrel juga dapat mengambil bentuk distribusi kesejahteraan.¹²

2.2.1. Konsep Politik Transaksional

Menurut Boissevain, transaksional adalah menjelaskan hubungan pertemanan atau persaudaraan dalam setiap pendekatan untuk memenuhi permintaan. Faktor persahabatan adalah penting dan jadi keutamaan. Pada kondisi tertentu pendekatan transaksional meletakkan peran individu lebih dominan, dan tidak terikat kepada peraturan atau sistem. Politik transaksional dapat berupa perjanjian politik antar beberapa pihak dalam usaha menerima serta memeralat kekuasaan.¹³

Boissevain lebih jauh menjelaskan bahwa pendekatan transaksional coba membongkar ruang pribadi dalam masyarakat,

¹¹ Susan Stokes et al dalam Mada Sukmajati. Politik Gentong Babi. (Online).(<http://fisipol.ugm.ac.id/news/politik-gentong-babi/id/>, diakses 27 februari 2017).

¹² Adji, Reka. Jurnal: PATRONASE DAN KLIENTALISME PADA PILKADA SERENTAK KOTA KENDARI TAHUN. Vol. 2, No. 1, Maret 2017: 33 - 45

¹³ Kholid. Politik transaksional di aras lokal(Dinamika Rasional Choice Masyarakat Muslim pada pemilihan umum Legislatif Kabupaten Wonosobo Tahun 2014).2016. Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Hal 2-3.

mencoba membedah fakta sosial yang tersembunyi, dalam hubungan transaksional hanya boleh berjalan apabila semua peraturandan kesepakatan yang telah ditentukan. politik transaksional adalah suatu gerakan yang bersifat pragmatis. Hal itu bisa dilihat karena dampak sistem kapitalisme. Dalam hubungan transaksional terdapat individu yang mencari kesempatan, dan memanfaatkan keuntungan untuk mencapai kekuasaan.

Berdasarkan uraian diatas politik transaksional adalah suatu bentuk transaksi dari dua pihak yang saling mempunyai kebutuhan dan saling menguntungkan. Itu bisa di konseptualisasikan sebagai tindakan memberi uang, barang dan jasa untuk tujuan mempengaruhi pilihan pemilih agar memilih calon tertentu dalam pemilihan. Denga demikian, sangat erat kaitannya dengan tujuan pemenangan seorang calon dalam pemilu.

Ada beberapa komponen yang hadir terkait praktek uang dalam pemilu. Komponen-komponen tersebut antara lain: (1) pemberi dan penerima politik uang, (2) modus dan bentuk praktek politik uang, (3) pola penyaluran politik uang.¹⁴ Dalam konteksnya politik transaksional tidak lagi berbicara mengenai etika, moral atau pun hati nurani, yang penting adalah sumberdaya. Kekuasaan dan kehormatan bisa dibeli dengan materi. Uang tidak lagi menjadi alat tetapi sudah menjadi tujuan hidup individu. Untuk memperoleh kekuasaan baik lingkup nasional maupun lokal seperti presiden, gubernur, bupati, dan kepala desa diperlukan materi.

Politik transaksional biasanya lahir dari budaya politik patron klien. Pola hubungan ini didasarkan dari kebutuhan yang saling menguntungkan sehingga menimbulkan saling ketergantungan. Kebutuhan ini biasanya berupa sumberdaya seperti barang dan jasa,

¹⁴ H.M.Abdul Kholiq. Perilaku Politik Transaksional(menggagas fenomena praktek politik uang dalam pemilu). Hal.104

maupun bentuk-bentuk lainnya. Proses transaksional menjelaskan hubungan antara patron dan klien dalam setiap pendekatan untuk memenuhi permintaan. Faktor kekeluargaan dan pertemanan biasanya menjadi keutamaan.

Selain daripada pola patron klien, politik transaksional juga didasari dari sistem ekonomi kapitalis. Yang membentuk orientasi masyarakat mengedepankan uang dan ketidakpercayaan terhadap calon-calon pemimpin sehingga melahirkan pragmatisme didalam masyarakat. Sistem kapitalisme juga berdampak pada terbentuknya desain politik yang jauh dari konsep politik sebenarnya.

Politik transaksional kapitalistik dapat dikategorikan kedalam money politic. Uang mempunyai keuntungan dibandingkan dengan sumber daya lainnya seperti jasa maupun bentuk natural lainnya. Uang sangat mudah untuk ditransfer dan dapat digunakan untuk aktivitas apa saja tanpa perlu diketahui sumbernya. Mendefinisikan bantuan, sumbangan secara luas dan terperinci untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (conflict of influence), ataupun pengaruh berlebihan (excessive and abusive influence) sehingga segala bentuk sumbangan harus diatur dalam undang-undang serta dapat dikontrol. Sumbangan dalam dana kampanye sebagai segala yang memiliki nilai (anything of value), termasuk barang dan jasa, dalam bentuk uang maupun natural.¹⁵

Dalam proses pencalonan biasanya tidak lepas dari penggunaan uang sebagai bentuk kampanye. Money politic ini biasanya melibatkan hampir seluruh elemen sosial, baik itu pejabat, politisi, pendidik, ataupun masyarakat secara umum. Fenomena ini biasanya diartikan sebagai bantuan politis karena realitas politik yang menganggap bahwa selalu ada pertukaran sosial. Kondisi ini

¹⁵*Opcit.* Kholid. Politik transaksional di aras lokal (Dinamika Rasional Choice Masyarakat Muslim pada pemilihan umum Legislatif Kabupaten Wonosobo Tahun 2014). Hal.3

meniscayakan seseorang untuk dipenuhi oleh penggarapan timbal balik.

Pada prakteknya, bentuk money politic yang dilakukan cukup bervariasi. Masing-masing calon mempunyai cara tersendiri baik secara umum maupun secara tersembunyi. Bantuknya bisa seperti: (1) membagikan uang pada proses pemilu,(2) membagikan barang dan jasa. Bentuk politik uang ini tergantung pada kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik daerah masing-masing. Penyaluran money politic ini juga bisa dilakukan orang calon itu sendiri maupun dilakukan oleh tim sukses dari calon tersebut, hal itu tergantung dari cakupan pemilu itu sendiri. Di Indonesia ada beberapa macam money politic, yaitu :

1. Berbentuk Uang

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang. Dalam pemilihan Presiden, uang sangat berperan penting. Modus *Money Politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

- 1) Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.

2) Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan Money Politic misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya.¹⁶

2. Berbentuk Fasilitas Umum

Cara untuk mendapatkan suara rakyat dengan cari muka atau tebar pesona dan trik. Simpati ternyata tidak hanya menguntungkan bagi rakyat secara personal. Dalam masa-masa pemilihan umum untuk mendapatkan suara, tak jarang para pasangan calon memberikan dana kepada masyarakat untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang sedang di lakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan semen, pasir, dan sebagainya. Dengan harapan agar masyarakat memelilih paslon tersebut dikarenakan paslon tersebut telah mau memberikan bantuan dalam menyelesaikan persoalan pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat yang belum selesai dibangun.

Asumsi atas realitas tersebut dapat di perkuat melalui sebuah kerangka teoritik yang ada dalam sistem pertukaran sosial. Parsudi suparlan (1992) menuturkan bahwa sejatinya tidak ada pemberian (hibah) yang sifatnya Cuma-Cuma. Karena menurutnya segala bentuk pemberian ada dasarnya akan selalu diikuti dengan suatu pemberian kembali berupa imbalan dalam bentuknya yang beragam. Karena itu, yang terjadi bukanlah sebatas sebuah

¹⁶Holish dkk.2018.*Money Politic* dalam Praktik Demokrasi Indonesia.Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.Vol 4 No. 2. Hal 232.

pemberian yang secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain. Melainkan pemberian tersebut merupakan bagian dari sistem tukar menukar pemberian yang dilakukan oleh dua orang atau suatu kelompok yang saling membari, dimana pihak penerima akan berusaha mengimbangnya.¹⁷

Dalam melaksanakan atau melakukan aksi sesuatu, tentu dibutuhkan yang namanya strategi. Menurut Glueck dan Jauch, strategi adalah rencana yang menghubungkan keunggulan strategis dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi¹⁸. Beberapa bentuk strategi yaitu :

1. Serangan Fajar

Serangan fajar adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk Politik uang dalam rangka untuk membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan salah satu calon yang akan menduduki suatu posisi sebagai pimpinan politik pada pagi hari sebelum pelaksanaan pemilihan umum dilakukan. Serangan fajar umumnya menyasar kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

Bentuk praktik money politic yang dilakukan adalah dengan cara membagi-bagikan uang menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan masyarakat memilih partai atau kader tertentu. Politik uang (*Money Politics*) paling rawan terjadi pada saat menjelang pencoblosan yaitu pemberian uang maupun barang pada saat subuh atau dini hari dengan mendatangi rumah-rumah

¹⁷Simatupang Jonasmer, Muhammad Subekhan. 2018. Pengaruh politik uang dalam pemilu terhadap keberlanjutan demokrasi Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol 4 No.3. Hal.1307.

¹⁸ Ibid. Pengaruh politik uang dalam pemilu terhadap keberlanjutan demokrasi Indonesia. Hal.1307

penduduk yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih salah satu calon pada saat memilih di TPS.¹⁹

2. Mobilisasi Massa

Mobilisasi politik adalah hal yang biasa terjadi pada sistem politik apapun. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan massa, baik sadar maupun tidak, untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan mendesak sebuah kelompok politik(partai politik, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, atau asosiasi asosiasi sipil tertentu). Mobilisasi tidak mengindahkan besaran ruang pengambilan keputusan, kehadiran partisipasi, dan juga kontrol atas keputusan politik yang ada. Dalam hal ini, kandidat yang pandai dalam menggerakkan suara massa sehingga beralih kepada dirinya akan memperoleh kekuasaan.²⁰

Kandidat atau partai dengan cara membeli dan warga atau pemilih yang mejual suaranya. Pembelian suara dapat diartikan juga sebagai memberikan uang atau manfaat lainnya kepada pemilih dengan tujuan untuk mendukung suatu kandidat/partai tertentu. Jual beli juga bisa dilakukan antara kandidat atau partai dengan para penyelenggara pemilihan. Pemberian uang dimaksudkan sebagai imbalan atau insentif untuk memanipulasi hasil pemilu. Sehingga dalam pemilihan umum itu kandidat tersebut dapan memperoleh suara masyarakat banyak dengan memobilisasi masyarakat.²¹

¹⁹ Ibid. Pengaruh politik uang dalam pemilu terhadap keberlanjutan demokrasi Indonesia. Hal.1307-1308

²⁰ Andi Agustyara Marti. 2015. Kekuatan politik perempuan pada pemilihan kepala desa(Studi Kasus : Desa Cumpiga Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Periode 2012-2018).Hal.26-27

²¹ Opcit.Pengaruh politik uang dalam pemilu terhadap keberlanjutan demokrasi Indonesia. Hal.1308

2.3. Konsep Money Politic

Tindakan Money Politik memang sulit untuk diartikan secara pasti karena masing-masing masyarakat mengartikan Money Politics dengan persepsi yang berbeda-beda sehingga pengertian dari Money Politics masih belum di pastikan secara rinci dan M. Abdul Kholiq mengartikan Money Politics adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon legislatif/calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi money politic merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama pemilihan umum.²²

Hamdan Zoelva mengemukakan beberapa bentuk dari Money Politics yang umum terjadi di Indonesia yaitu

1. Money Politics pada lapisan atas yaitu transaksi antara elit-ekonomi/pemilik modal, dengan elit politik atau calon, dengan janji atau harapan setelah terpilih akan mendapatkan kebijakan yang menguntungkan pemilik modal. Inilah money politic yang berdampak sangat strategis dalam kehidupan politik. Pemilik modal dapat mendikte kebijakan partai atau calon ketika telah memenangkan pemilihan. Hal ini terjadi karena dengan keterbatasan dana anggota partai untuk menyumbang partai, maka sangat mungkin partai mengambil jalan pintas dengan sumber dana dari elit ekonomi, kantong pribadi calon serta uang negara yang tidak halal.
2. Money Politics lapisan tengah, antara elit politik yaitu bakal calon dengan elit partai, dalam bentuk pembayaran kepada pribadi elit

²² Andi Akbar. Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa). 2016.Hal 4.

partai untuk menjadi calon atau menentukan nomor urut calon atau antara calon dengan penyelenggara untuk membeli suara atau mengatur pemilih.

3. Money Politics dilapisan bawah yaitu transaksi antara elit politik atau calon dengan masa pemilih. Bentuknya berupa uang, sembako, kredit ringan atau bentuk lainnya pemberian uang atau barang lainnya yang tidak patut.²³

Praktik money politic di Indonesia tumbuh sangat subur bagaikan jamur yang tumbuh dimusim hujan. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap praktik money politik merupakan suatu kewajaran, sehingga masyarakat tidak lagi peka terhadap bahaya-bahaya yang akan timbul dikarenakan praktik praktik money politic ini. Masyarakat membiarkan tindakan ini, karena tidak merasa bahwa money politik secara normatif harus di jauhi. Sehingga semua itu berjalan sekaan-akan merupakan suatu hal yang wajar. Kendati jelas terjadi money politk, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes.²⁴

2.4. Kerangka Konseptual

Secara umum money politic diartikan sebagai suatu bentuk hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang didasari oleh suatu kepentingan yang sama dan saling menguntungkan. Money politic merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas tentang money politic yang terjadi pada pilkades di desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba.

Dalam membahas tentang money politic penulis menggunakan teori politik transaksional. Politik transaksional berarti politik dagang, ada yang

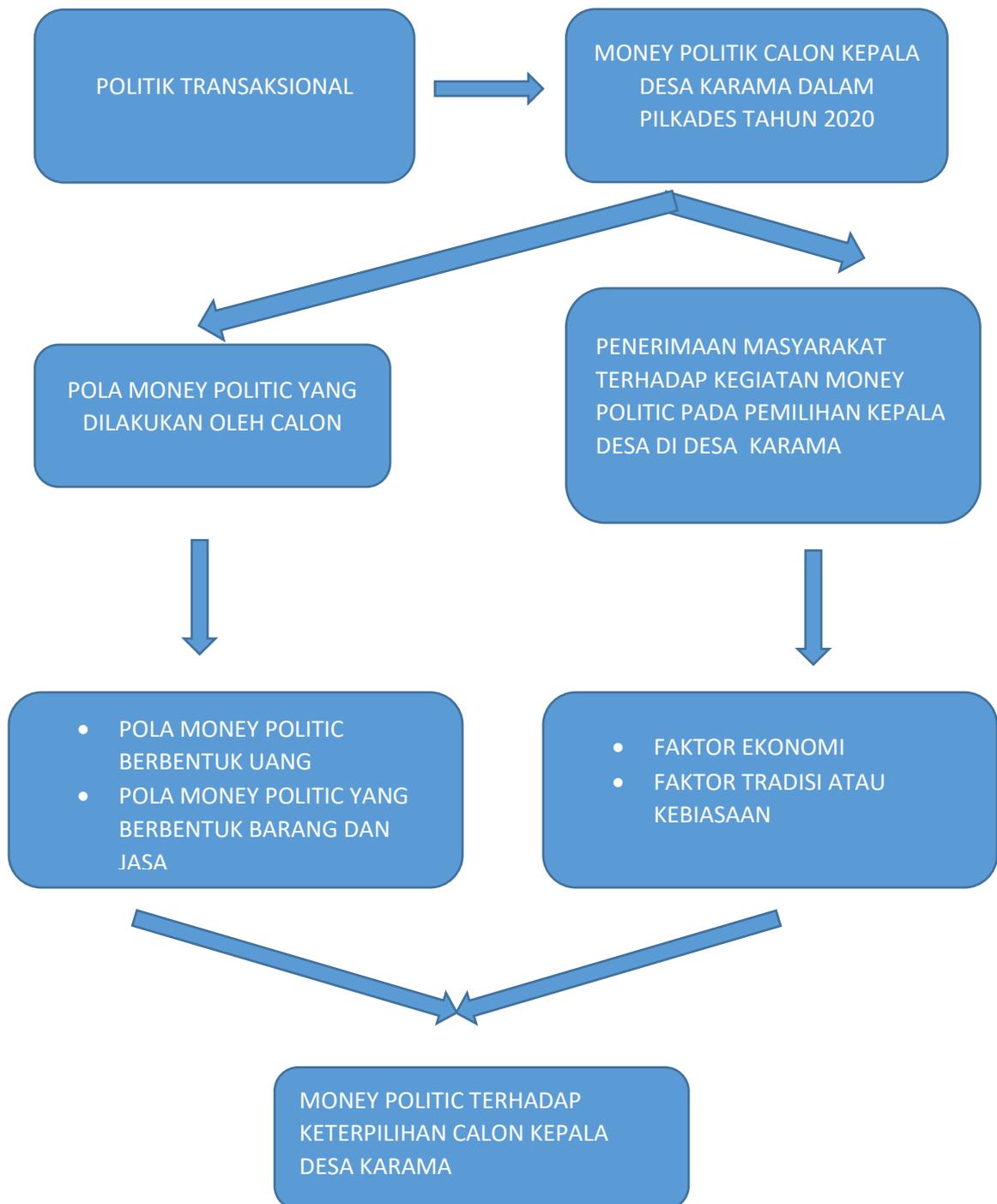
²³ Ibid. Hal 5-6.

²⁴ Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan, Skripsi: Seminar Nasional Hukum Universitas "Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia" (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018), Hal.2.

menjual dan ada yang membeli. Tentu semuanya membutuhkan alat pembayaran yang ditentukan bersama. Jika dalam jual-beli, transaksi ini tidak hanya berbicara mengenai uang tunai saja tetapi biasa berupa barang yang bernilai ekonomis. Pada praktik politik, jika terjadi politik transaksional, ada yang memberi uang dan ada yang menerima uang dalam transaksi politik tersebut. Teori politik transaksional terbagi atas 2 macam yaitu berupa uang dan fasilitas umum.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan skema pikir yang menggunakan teori politik transaksional dan konsep money politic sebagai factor pendukung untuk melihat topic pembahasan khususnya dalam proses praktik money politic dalam pemilihan kepala desa di Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba.

2.5 Skema pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang perangkat-perangkat penelitian mulai dari pemilihan lokasi penelitian, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data serta konsep operasional yang sangat membantu dalam kelangsungan penelitian ini.

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu,peneliti menetapkan lokasi penelitian yaitu di Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Alasan dipilihnya lokasi ini untuk melihat proses terjadinya money politik pada pemilihan kepala desa.

3.2. Tipe dan Dasar Penelitian

3.2.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan secara deskriptif dari data yang diperoleh faktor apa yang menjadi penyebab masyarakat melakukan money politic. Dengan tipe penelitian ini penulis untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab masyarakat mau menerima money politik, Serta penulis ingin menggambarkan secara mendalam bagaimana kejadian yang sebenarnya dilapangan tentang faktor tersebut.

3.2.2. Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Zainal Arifin penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang lakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi,serta jenis data yang di kumpulkan terutama data kualitatif.²⁵ Penelitian kualitatif menganalisa perilaku dan sikap

²⁵ Zainal Arifin. 2011. *penelitian pendidikan metode dan paradigm Baru*. Bandung: :rosda karya. hal.140

politik yang tidak dapat atau dianjurkan untuk dikuantifikasikan. Penelitian kualitatif cenderung fokus pada usaha mengeksplorasi sedetail mungkin peristiwa atau kasus yang akan diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam.

Penelitian kualitatif akan memudahkan peneliti menyusun proposal, melakukan pengumpulan data, analisis, dan juga mengembangkan laporan studinya. Peneliti melakukan pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan informan yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisa kekuatan politik yang dimiliki oleh kepala desa perempuan tersebut sehingga bisa terpilih mengalahkan lawan-lawan politiknya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mencari, menggambarkan, dan menganalisis objek penelitian dengan interpretasi yang tepat. Data yang dikumpulkan tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, terperinci, akurat dan tuntas. Jenis penelitian menggunakan kualitatif, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hal ini terlihat dari prosedur yang ditetapkan yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.³⁰ Penelitian kualitatif mencoba untuk memahami, mendalami, dan menerobos masuk di dalamnya terhadap suatu gejala-gejala. Sehingga dicapai suatu simpulan yang obyektif dan alamiah sesuai dengan gejala-gejala pada konteks tertentu.²⁶

3.3. Jenis Data Penelitian

²⁶ Suyitno, 2018. Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya. Tulungagung: Akademia Pustaka. Hal. 6

Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperoleh melalui :

3.3.1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, di mana wawancara tersebut tentunya berhubungan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam yang di lakukan dengan informan yang berkaitan dengan terjadinya money politik pada saat pemilihan kepala desa di desa Karama.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder sebagai pelengkap dan pendukung yang dimaksudkan untuk melengkapi data primer dan hasil dari penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku, tulisan-tulisan, dan juga literatur-literatur yang relevan dengan penelitian. Data sekunder merupakan data yang sudah di olah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap proses penelitian, pengumpulan data bertujuan untuk mengungkapkan fakta mengenai perihal yang akan diteliti. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yang dijadikan acuan untuk mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut :

3.4.1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara langsung dan terbuka sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai. Dalam

proses ini, peneliti semaksimal mungkin berusaha untuk menciptakan suasana yang betul betul *rileks* (suasana keakraban) dengan informan. Dengan harapan, informan bisa memaparkan secara lengkap, jelas, dan terperinci apa yang nantinya ditanyakan oleh peneliti kepada informan.

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai informan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian, yakni bagaimana praktik money politic pada pemilihan kepala desa Karama Kecamatan Rilau Ale kabupaten Bulukumba tahun 2020 meski tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Informan yang dipilih adalah informan yang benar-benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Adapun yang menjadi informan adalah:

1. Kepala desa terpilih, data yang ingin diperoleh dari informan ialah apa yang melatarbelakangi sehingga melakukan money politic.
2. Tim pemenangan, data yang ingin diperoleh dari informan ialah apa yang menjadi tolak ukur tim pemenangan memberikan money politic kepada masyarakat.
3. Lawan politik, data yang ingin diperoleh dari informan ialah ingin melihat beberapa penting money politic dilakukan dalam proses kampanye.
4. Tokoh masyarakat, data yang ingin diperoleh dari informan pengaruhnya terhadap penerimaan money politic dimasyarakat.

3.4.2. Studi Pustaka

Dengan membaca sumber-sumber atau literatur mengenai partai politik dan strategi politik, media sosial, serta literatur-literatur lainnya yang menyangkut objek penelitian.

3.4.3 Observasi

Peneliti ini mencoba terjun langsung kelapangan dan bergabung dengan orang-orang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.5. Teknik Analisa Data

Analisa merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam kegiatan penelitian, terutama bila diinginkan generalisasi atau untuk memperoleh kesimpulan yang tegas dari hasil penelitian yang dilakukan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, hal ini dimaksudkan agar tetap berada pada fokus penelitian. Penulis menggambarkan masalah yang terjadi menggunakan argumen yang jelas dan memfokuskan perhatian pada pengumpulan data serta informasi melalui observasi dan wawancara mendalam.

Data-data dari hasil wawancara dan pengamatan (observasi) sehari-hari dicatat secermat, serinci mungkin dan dikumpulkan sehingga menjadi suatu catatan lapangan atau *field notes*. Selanjutnya data dan informasi tersebut dianalisa secara kualitatif sehingga apa yang terkandung dalam realitas dapat segera mungkin diungkap. Karena analisis penelitian ini bersifat kualitatif, maka penyajian data disajikan dalam bentuk narasi yaitu berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan realitas politik yang ada di lokasi penelitian.

Proses analisis data secara keseluruhan dengan menggelar seluruh data mentah yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan atau observasi yang ditulis dalam catatan lapangan dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dibaca, dipelajari, ditelaah, kemudian direduksi atau dipilih sesuai dengan kategori-kategori tertentu (semisal, tema, topik) menentukan batas-batas permasalahan sehingga mendapatkan gambaran yang jelas.

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

Selanjutnya, mengabstraksikan data tersebut dengan berpegang pada keaslian data. Hasil dari abstraksi kemudian dianalisa berdasarkan kerangka pemikiran, konsep-konsep, teori-teori yang digunakan kemudian dideskripsikan, setelah itu baru diinterpretasikan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan menggambarkan kondisi lokasi penelitian mengenai praktek money politic pada pemilihan kepala desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba tahun 2020, yang secara lebih dalam menggambarkan situasi dan kondisi masyarakat Desa Karama.

4.1. Sejarah Singkat Bulukumba

Penamaan Bulukumba Penamaan "Bulukumba", bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu "Bulu'ku" dan "Mupa" yang dalam bahasa Indonesia berarti "masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya". "Bulu'kumupa" yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi "Bulukumba". Sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten. Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang Lambang Daerah.²⁷

Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994. Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada 41 Hasanuddin, yaitu pada tanggal 4 Februari

²⁷ Hasanuddin, spektrum sejarah budaya dan tradisi Bulukumba, Hasanuddin University Press 2005, Hal 7

1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan bupati pertama, yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960²⁸

4.2. Gambaran Umum Desa Karama

4.2.1. Sejarah Singkat Desa Karama

Desa Karama merupakan salah satu Desa dari 14 (Empat Belas) Desa dan 1 (Satu) Kelurahan yang ada di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Desa Karama terdiri atas 5 (Lima) Dusun yaitu:

- Dusun Panasa
- Dusun Buhung Luara
- Dusun Lempongge
- Dusun Katangka
- Dusun Kampung Baru

Tahun 1950 Kecamatan Bulukumpa Tua diperintah oleh kepala Distrik I yaitu Kr. Tahajjie. Selang beberapa tahun kemudian terbentuklah sebuah Desa pertama yang bernama Desa Sampeang sehingga memunculkan nama desa tersebut di gelar Puang ADE' SAMPEANG yang dikepalai Palalloi, seiring berputarnya waktu Kepala Distrik I Kr. Tahajjie diganti oleh Kr. Nojeng selaku Kepala Distrik yang sama yaitu Puang ADE'SAMPEANG yang dipimpin oleh Puang Kari.

Kemudian pada tahun 1959-1961 kepada distrik yaitu karaeng Nojeng digantikan oleh Andi Abdul Syukur dengan kepala Desanya Kr.Rihu saat itu juga gerombolan DI/TII membumi hanguskan Desa Sampeang, rumah-rumah penduduk dibakar bahkan sebagian penduduk mengungsi kekota dan sebagian lari ke hutan. Selama

²⁸ Hasanuddin, spektrum sejarah budaya dan tradisi Bulukumba, Hasanuddin University Press 2005, Hal 9

kurang lebih dua tahun Desa Sampeang dikuasai gerombolan (GURILLA) sehingga daerah itu seakan-akan mati, sunyi karena tak berpenghuni.

Saat ketertiban sudah dapat dipulihkan oleh TNI pada tahun 1962 yang berhasil menguasai dan menyisir semua kantong-kantong gerombolan sehingga ruang gerak gerombolan semakin dipersempit dan pada akhirnya meninggalkan Desa Sampeang. Dalam situasi dan kondisi yang mulai normal nama Bulukumpa Tua diubah dengan Bulukumpa yang dipimpin oleh Karaeng Mansu. Kemudian nama gelaran diubah menjadi Desa Palampang yang dikepalai oleh Andi Muh.Dahlan.

Pada tahun 1988-1990 Desa Palampang dimekarkan dan terbentuklah Desa Persiapan Karama yang dijabat oleh Andi Muhammad Umar Baco selama beberapa Tahun. Kemudian diadakan pemilihan Kepala Desa Karama, yang definitive dan disaat tansisi kepemimpinan ditetapkan dua nama calon yaitu M.Ramli Tipu dan Andi Umar Baco mutlak meraih suara 80% dari jumlah pemilih saat itu.

Pada masa jabatan Andi Umar Baco pada tahun 1990-2007 terjadi banyak perubahan khususnya dalam pembangunan. Jalan Desa dibenahi, Jembatan, dekker, dan infrastruktur lainnya dibangun. Pemindehan kantor Desa Karama yang terletak di Desa Swatani kekantor Desa yang baru (yang ditempati sekarang) sampai akhir masa jabatannya. Andi Umar Baco diganti karena sesuai dengan Undang-Undang desa yang sekarang, kepala desa hanya bisa menjabat dua periode dan saat itulah diganti oleh Andi Harianto sebagai kepala Desa tahun 2007-2020

Dalam pemilihan kepala desa pada bulan Maret tahun 2020 untuk periode ketiga andi Harianto tidak memenangkan pemilihan melainkan Jusman lah yang berhasil dalam pemilihan kepala desa Karama yang dilakukan secara demokrasi, dan transparan tanpa adanya unsur apapun.

4.2.2. Kondisi Geografis

Desa Karama adalah merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Terletak kurang lebih antara 3° 25' 40,80" LS – 3° 23' 27,24 LS dan 102° 8' 21,4" BT – 102° 10' 7,32" BT. Secara administratif, wilayah Desa Karama memiliki batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Salassae
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Swatani
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bonto Haru
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Batu Karopa

Luas wilayah Desa Karama adalah 10,19 KM² yang terdiri dari 60% berupa pemukiman, 40% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan dan persawahan. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Karama mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya.

4.2.3. Demografi Penduduk Desa Karama

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa adalah 4142 jiwa, yang terbagi yaitu jumlah Laki-laki sebanyak 1929 Jiwa dan jumlah penduduk perempuan adalah 2213 jiwa.

Tabel 4.1 Demografi Desa Karama

Jenis Kelamin	Jumlah
(a)	(g)=(b)+(c)+(d)
Laki – laki	1929 Jiwa
Perempuan	2213 Jiwa
Jumlah Jiwa	4142 Jiwa
Jumlah KK	1070

Sumber: Profil Desa Karama Tahun 2020

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Klp. Umur (tahun)	Jumlah
	JIWA
0 – 4	897
5 – 9	550
10 – 14	575
15 – 39	917
40 – 59	968
60 ke atas	235
Jumlah	4142

Sumber: Profil Desa Karama Tahun 2020

Desa Karama yang adalah kecamatan yang merupakan sentra pengembangan pertanian dan perkebunan serta pusat pengembangan hortikultura. Desa Karama memiliki curah hujan di atas 2000 mm/tahun. Desa Karama yang memiliki 5 dusun, masing-masing memiliki Sumber Daya Alam tersendiri.

Adapun jenis sumber daya alam yang ada di Desa Karama dapat diurai sebagai berikut:

- a. Area persawahan yang terdapat di semua dusun;
- b. Area perkebunan yang terdapat di semua dusun;
- c. Padang rumput yang ada di dusun Kampung Baru, Katangka dan Lempongne;
- d. Genangan air musiman (danau musiman) yang ada di dusun Katangka;
- e. Sungai utama dan anak sungai yang melintasi semua dusun.

Tabel 4.3 Keadaan Sosial Desa Karama

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
A.	Tingkat Pendidikan			
	▪ Belum sekolah		Jiwa	
	▪ TK		Jiwa	
	▪ SD / sederajat	90	Jiwa	
	▪ SMP / sederajat	225	Jiwa	
	▪ SMA / sederajat	420	Jiwa	
	▪ Diploma 1	150	Jiwa	
	▪ Diploma 2		Jiwa	
	▪ Diploma 3		Jiwa	
	▪ Strata 1		Jiwa	
	▪ Strata 2		Jiwa	
	▪ Strata 3		Jiwa	
No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
B.	Agama			
	1. Islam	4142	Jiwa	100 %
	2. Kristen Katolik	-	Jiwa	Tidak ada
	3. Kristen Protestan	-	Jiwa	Tidak ada
	4. Hindu	-	Jiwa	Tidak ada
	5. Budha	-	Jiwa	Tidak ada

Sumber: Profil Desa Karama Tahun 2020

Wilayah Desa Karama memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, lokasi yang relatif dekat dengan Ibukota Kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun non formal.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan kriteria tahapan kesejahteraan keluarga untuk mengukur kesejahteraan. Lima pengelompokan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut:

a) Keluarga pra sejahtera, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai keluarga sejahtera tahap I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan;

b) Keluarga sejahtera tahap I, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu:

- Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.

c) Keluarga sejahtera tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis yaitu:

1. Anggota keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk melaksanakan ibadah secara teratur.
2. Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/lkan/telur sebagai lauk pauk.
3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
4. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.
5. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
6. Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.

7. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
8. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.

d) Keluarga sejahtera tahap III, yaitu keluarga yang memenuhi syarat dari keluarga sejahtera tahap I dan tahap II dan dapat pula memenuhi syarat pengembangan keluarga yaitu :

1. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
2. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
3. Berkomunikasi antar anggota keluarga.
4. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
5. Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
6. Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
7. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai engan kondisi daerah setempat;

Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk Desa Karama Berdasarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN):

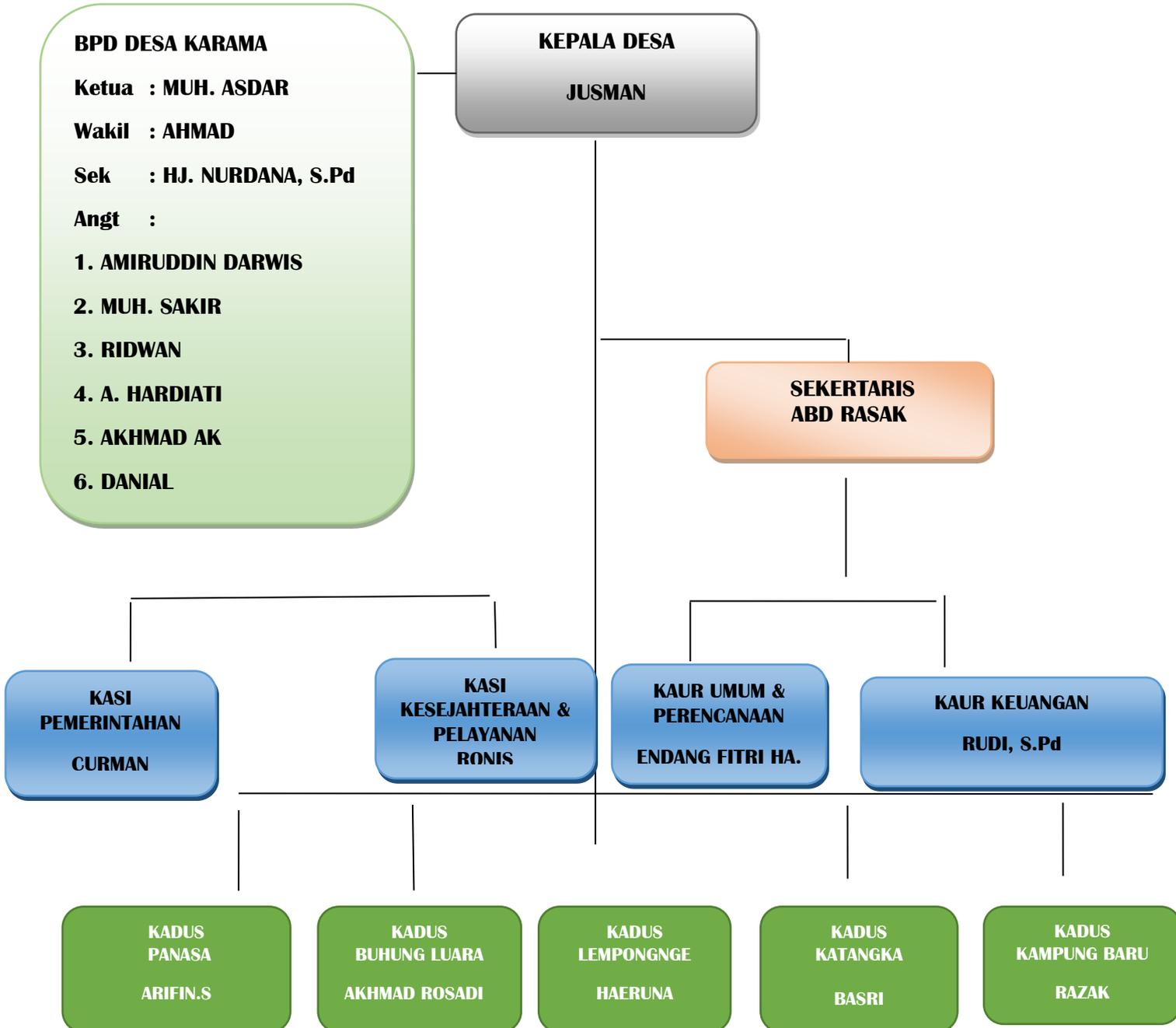
Tabel 4.4 Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Karama

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
A	Tingkat Kesejahteraan			
	1. Prasejahtera	167		
	2. Sejahtera 1	200		
	3. Sejahtera 2	36		
	4. Sejahtera 3	7		
B	Mata Pencaharian			
	• Buruh Tani	-	Jiwa	
	• Petani	500	Jiwa	
	• Pedagang	13	Jiwa	
	• Tukang Kayu	5	Jiwa	
	• Tukang Batu	11	Jiwa	
	• Penjahit	7	Jiwa	
	• PNS	25	Jiwa	
	• TNI / Polri	30	Jiwa	
	• Pengrajin	12	Jiwa	
	• Industri kecil	8	Jiwa	
	• Wiraswasta	120	Jiwa	
	• Kontraktor	0	Jiwa	
	• Supir	9	Jiwa	
	• Montir / mekanik	10	Jiwa	
	• Guru Swasta/Honoror	17	Jiwa	
	• Pensiunan	15	Jiwa	
	• Tukang Cukur	4	Jiwa	
	• Buruh harian lepas	322	Jiwa	
C	Kelembagaan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja			
	• Koperasi	-	Unit	
	• Industri Kerajinan		Unit	
	• Industri Pakaian	-	Unit	
	• Industri Makanan	-	Unit	
	• Industri Alat Rumah Tangga	-	Unit	
	• Bidang Angkutan		Unit	
	• Simpan Pinjam	1	Klp	

Sumber: Profil Desa Karama Tahun 2020

4.2.4. Struktur Pemerintahan Desa Karama

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA KARAMA KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Money politic adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Money politic dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan money politic sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara.

Maka money politic adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.

Desa Karama tahun 2020 melaksanakan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan serentak di kabupaten Bulukumba. Terdapat dua calon pertama Jusman kedua Andi Hariyanto, Pada pemilihan ini Jusman menjadi pemenang dan salah satu penyebab kemenangan Jusman itu diindikasikan karena adanya praktik Money Politic. Hal ini dibuktikan dengan ramainya isu-isu yang beredar terkait masalah tersebut, penelitian ini mencoba menelusuri isu tersebut dan membuktikan praktik money politic di desa Karama. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menelusuri faktor-faktor yang membuat masyarakat menerima atau menolak praktik money politic.

Salah satu hal yang dikatakan oleh tim sukses dari Jusman bahwa dia juga melakukan money politic berupa uang, barang dan jasa yang dibagikan jauh sebelum menjelang hari H pemilihan. Dari data itu ditemukan dua pola praktik money politic, yaitu yang pertama pola money politic berbentuk uang dan yang kedua berbentuk barang dan jasa

Hal inilah yang kemudian akan di jelaskan lebih jauh, guna melihat pola money politik yang di lakukan oleh calon yang bertarung dalam pemilihan kepala desa karama, serta penerimaan masyarakat terhadap kegiatan money politik di desa karama.

5.1. Pola Money Politic Yang Dilakukan oleh Calon

Dalam proses pencalonan biasanya tidak lepas dari penggunaan uang sebagai bentuk kampanye. Money politic ini biasanya melibatkan hampir seluruh elemen sosial, baik itu pejabat, politisi, pendidik, ataupun masyarakat secara umum. Fenomena ini biasanya diartikan sebagai bantuan politis karena realitas politik yang menganggap bahwa selalu ada pertukaran sosial. Kondisi ini meniscayakan seseorang untuk dipenuhi oleh penggarapan timbal balik.

Pada prakteknya, bentuk money politic yang dilakukan cukup bervariasi. Masing-masing calon mempunyai cara tersendiri baik secara umum maupun secara tersembunyi. Bantuknya bisa seperti: (1) membagikan uang pada proses pemilu,(2) membagikan barang dan jasa. Bentuk politik uang ini tergantung pada kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik daerah masing-masing. Penyaluran politik uang ini juga bisa dilakukan orang calon itu sendiri maupun dilakukan oleh tim sukses dari calon tersebut, hal itu tergantung dari cakupa pemilu itu sendiri.

5.1.1 Pola money politic berbentuk uang

Money politic dalam bahasa Indonesia adalah suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Menurut pakar hukum tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi money politic sangat jelas yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan (1999) kalau kasus money politic bisa dibuktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuaapan. Secara umum money politic biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi orang dengan menggunakan imbalan berupaya uang.

Pada pemilihan Kepala Desa tahun 2020 di Desa Karama tepatnya pada bulan Maret terdapat indikasi money politic yang dilakukan oleh pihak pemenang yaitu jusman dimana indikasi yang muncul beragam bentuk money politic:

“satu minggu sebelum pemilihan itu nabagikanmi orang uang 200 ribu per KK, tapi dalam lipatan sarung itu uang na bagikan, Cuma bukan dia yang langsung bagi ke warga tapi lewat tim suksesnya.”²⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa praktik money politik yang dilakukan oleh petaha dibagikan beberapa hari sebelum pemilihan. Penyaluran uang itu dilakukan dengan cara *door to door*, dengan mendatangi masyakat kemudian memberikan uang.

Uang yang diberikan pada saat menjelang pemilihan bervariasi, tergantung bagaimana kandidat melihat peluang dan target yang ingin dicapai disuatu wilayah. Didaerah yang dianggap bukan basis suatu kandidat maka akan diberikan uang dengan nilai yang lebih tinggi. Hal itu dilakukan agar masyarakat tersebut tidak memberikan hak suaranya kekandidat lain. Dari pernyataan tersebut kembali menguatkan pemahaman kita bahwa praktek money politik di desa karama memang sangat nyata dan berpengaruh dalam mengontrol masyarakat terutama dalam pilkades. Hal ini tidak lepas dari pengaruh ekonomi masyarakat, dengan adanya pengaruh ekonomi ini menjadi peluang bagi para kandidat dalam menjaring suara, salah satu caranya dengan money politic.

Hal itu diperjelas oleh Bapak Jusman selaku kandidat terpilih:

“Kalau masalah pinansial sebenarnya saya tidak bisa mengatakan bahwa itu mungkin tidak ada saya bilang tidak ada tapi ada, saya bilang ada karena tehnis saya bukan spontan langsung banyak tapi dengan lamanya saya bersosialisasi sehingga pinansial yang saya keluarkan berangsur-angsur sehingga saya tidak bisa mengatakan bahwa sekian tapi yang jelasnya kalau nilai yah pasti banyak mungkin, mungkin ratusan

²⁹ Wawancara dengan pak Heruna kepala dusun lempongge desa karama 28 april pukul 14:30

karena perjalanannya juga panjang bisa dikatakan bahwa 200-300an habis selama 4 tahun”.³⁰

Seperti yang dikatakan sebelumnya, semua hal ini terjadi diakibatkan pengaruh ekonomi memanfaatkan money politic yang dilakukan kandidat sebagai peluang dalam memenuhi ambisinya. Sedangkan di pihak petahana yang menjabat selama dua priode dan dalam periode ketiganya dalam proses pilkades menjadi hal terakhir bagi petahana mengingat pada priode tersebut berhasil di kalahkan seorang anggota TNI yang notabenenya baru pertama kali dalam mencalonkan.

Adapun hal yang melatar belakangi yaitu dari segi pendekatan dan membaca kondisi masyarakat dalam desa. Pola money politic yang dilakukan oleh petahana seperti Dalam pilkades yang terjadi di desa karama, pola dari money politic yang dilakukan oleh petahana hanya berlandaskan money politik secara umum yaitu dengan membagikan uang. Dari hal ini dapat kita lihat bahwa money politic dari petahana hanya satu arah dengan tujuan menjaga suara yang ada dan tidak bertujuan menambah suara dan memanfaatkan peluang yang ada.

“Waktu subuh beberapa jam sebelum pilkades di selenggarakan pihak petaha melakukan serangan money politik kedua kalinya dengan memberikan uang sejumlah seratus ribu perorang”.³¹

Hal ini kembali memperjelas pola money politik satu arah yang dilakukan oleh petahana menjelang pilkades, karena kecenderungan petahana tanpa melihat peluang seperti lawan politiknya membuat petahana sedikit tertinggal satu langkah, hal ini pun menjadi salah satu faktor dari kekalahan petahana.

³⁰ Wawancara dengan Pak Jusman kepala desa Karama 25 April pukul 11:25

³¹ Wawancara dengan caing salah satu pihak akademisi desa karama pada tanggal 28 pukul 17:00

5.1.2. Pola Money Politic Berbentuk Barang dan Jasa

Money politic adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Money politic umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum.

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa money politic yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih. Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut.

Hal ini dibenarkan dari beberapa pernyataan yang dilontarkan oleh beberapa informan seperti:

“saya itu kudukung sekali kalau majuki pak komandan sebagai kepala Desa karama, karena sering sekalika itu na bantu kalau ada apa-apanya anakku dimakassar, baru seringki juga na bagikan mentega, gula sama terigu untuk bikin kue kalau bulan puasaki. Kalau saya ikhlaska memang dukungki kalo mencalonkan, pokokna semua keluargaku yang masih termasuk warga desa Karama kusuruh semua pulang kalo pemilihan”³²

Dari pernyataan informan tersebut terlihat adanya praktek money politic yang dilakukan oleh salah satu kandidat khususnya pak Jusman. Hal tersebut terjadi karena adanya suatu bentuk transaksi dari dua pihak yang saling mempunyai kebutuhan dan saling menguntungkan. Itu bisa di konseptualisasikan sebagai tindakan memberi barang untuk tujuan mempengaruhi pilihan pemilih agar memilih calon tertentu dalam pemilihan. Dengan demikian, pemberian

³² Wawancara dengan Hj. Hasna salah satu toko perempuan di desa karama pada tgl 23 april 2020 pukul 16:25

berupa barang yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat.

Money politic sangat signifikan dalam mempengaruhi pilihan politik individu hal terlihat dari pemberian sebuah barang oleh kandidat dimana dalam prosesnya akan mengkonstruksi pola pikir masyarakat dalam memilih hal tidak lepas dari pengaruh yang diberikan oleh kandidat tersebut melalui pemberian barang. Praktek money politic yang dilakukan oleh Pak jusman dalam pilkades ternyata dalam perolehan suara yang di dapatkan jusman sangat berada diatas rata rata suara dari kandidat lainnya.

Keberhasilan dari money politik sebelumnya, jusman kembali melakukan money politik "*Saya pilihki pak komandan karena nakasi warga seragam majelis taqlim*"³³

Selain money politic dalam bentuk barang, Jusman juga melakukan money politic dalam bentuk pemberian suatu jabatan. Hal ini terlihat dari tanggapan informan:

*Saya pilih pak komandan karena ada kesepakatanku sama dia kalau menangki nakasi jadika kepala dusun. makana saya semangatka jadi tim sukses.*³⁴

Dari pernyataan di atas , telah menggambarkan adanya politik transaksional yang dilakukan oleh jusman terhadap masyarakat desa karama, sehingga politik transaksional inilah yang menjadi salah satu faktor keterpilihan jusman sebagai kepala desa karama, jika melihat tawaran yang diberikan oleh jusman yang menjanjikan suatu jabatan kepada haeruna dapat dikatakan sangat menguntungkan sehingga hal itulah yang mendorong haeruna yang merupakan seorang patron atau tokoh masyarakat untuk memilih jusman sebagai kepala desa. Haeruna sebagai salah satu patron di desa karama, tentunya juga di percaya oleh sebagian besar masyarakat sehingga ikut memilih jusman sebagai kepala desa dan membuat suara jusman meningkat pesat.

³³ Wawancara dengan ibu Rosma anggota majelis taqlim 26 april pukul 11:00

³⁴ Wawancara dengan pak Haeruna kepala dusun Lempongge desa Karama 28 april pukul 14:30

Ditinjau dari konsep politik transaksional yang menggunakan Pola hubungan ini didasarkan dari kebutuhan yang saling menguntungkan sehingga menimbulkan saling ketergantungan sehingga biasanya lahir dari budaya politik patronase. Hal tersebut karena patronase dipahami sebagai hubungan timbal balik yang dijalin secara khusus atas dasar saling menguntungkan.

Pada proses pilkades di Desa Karama, Jusman sebagai kandidat penantang menggunakan tokoh politik untuk mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Tokoh masyarakat dipercaya mampu sebagai penggerak untuk mendapatkan simpati masyarakat. Masyarakat yang telah percaya dan yakin kepada para tokoh masyarakat bisa saja mengikuti pilihan dari tokoh-tokoh masyarakat tersebut. Selain itu, mereka-mereka sangat berpotensi mendorong perolehan suara salah satu kandidat.

Dari pembahasan tersebut terlihat bahwa pola yang dilakukan oleh kandidat menggunakan pola politik transaksional yang memanfaatkan pemberian barang dan jasa yang di berikan kepada masyarakat desa karama untuk memilih kandidat yang bernama jusman sebagai kepala desa di desa karama .selain itu, jusman juga memanfaatkan pola patronase sebagai instrument memperoleh suara yang juga di gunakan sebagai perantara dalam menjalankan praktik money politic dalam pemilihan kepala desa di desa karama.

5.2. Faktor Penerimaan Masyarakat Terhadap Kegiatan Money Politic Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Karama.

Masyarakat desa Karama menerima money politic dengan baik karena beberapa faktor, yaitu tingkat ekonomi yang rendah, dan tingkat pendidikan yang rendah, serta faktor tradisi atau kebiasaan, sehingga mereka menganggap bahwa money politic sah-sah saja. Dan sudah menjadi kebiasaan dari dahulu. Hal ini terjadi selain dari beberapa faktor sebelumnya pengaruh dari kurangnya sosialisasi politik yang dilakukan

pemerintah juga menjadi faktor penting mengapa money politic di desa karama di anggap sah-sah saja dan menjadi kebiasaan.

5.2.1. Faktor Ekonomi

Masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi yang ideal bagi setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemakmuran berarti kedamaian, keamanan dan kebahagiaan. Ini berarti kondisi manusia untuk kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan masyarakat.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial³⁵. Hal inilah yang kemudian menjadi suatu standarisasi di dalam masyarakat dalam menentukan kesejahteraan. Pembagian standarisasi masyarakat ini kemudian menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat penerimaan masyarakat desa karama terhadap praktik money politic dalam proses pemilihan kepala desa.

Masyarakat yang berada pada taraf ekonomi yang maju atau berada dalam golongan sejahtera I, cenderung menolak praktik money politic yang terjadi pada pemilihan kepala desa di desa karama. Karena masyarakat desa karama yang berada pada golongan sejahtera I menganggap bahwa uang yang di berikan oleh calon kepala desa tidak berdampak karena mereka merasa masih berkecukupan dan bahkan lebih untuk menghidupi keluarganya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh salah satu responden

“saya itu ada hubungan keluargaku sama andi Ato, tapi na tauki bilang bukan dia kudukung makanya datangki dirumahku nakasihka uang 500 supaya dia kupilih tapi kutolakki itu uang, nda kuterimai karena memang nda kusuka sifatnya, sukaki pergi mabok-mabok, baru dua periodemi dia menjabat na tidak ada

³⁵ UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT MAHENDRA RAMADHIANTO halaman 4

perkembangan, makanya mauka pilih sesuai hati nuraniku selain itu Alhamdulillah saya masih punya uang untuk makan.”

Dari hasil penelitian diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi menengah keatas. Masyarakat yang termasuk masyarakat menengah keatas atau masyarakat sejahtera itu cenderung memiliki pendidikan politik yang memadai. Pendidikan politik itu sangat penting dalam proses demokrasi.

Bagi masyarakat yang punya pendidikan politik yang memadai itu akan memilih kandidat melihat dari rekam jejaknya. Masyarakat akan cerdas dalam memilih dan mengangkat wakil rakyat dan pemimpinnya, dengan melihat kemampuannya yang dimiliki oleh calon, sikap amanah integritasnya dan sebagainya, supaya terjamin bahwa mereka yang terpilih benar- benar orang yang terbaik dan mampu menjalankan tugas publik yang dipercayakan kepadanya.

Faktor ekonomi merupakan landasan bagi masyarakat dalam penerimaan Money Politics yang ditawarkan oleh calon kandidat. Bagi masyarakat yang tergolong sejahtera itu cenderung tidak akan memilih kandidat berdasarkan pemberian sesuatu. Sedangkan Mayoritas masyarakat desa Karama yang merupakan masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah dimana kebanyakan dari masyarakat tidak memiliki penghasilan yang tetap dalam sebulannya memberikan dukungan suara pada pemilu nanti hal ini disampaikan oleh berdasarkan pemberian sesuatu oleh kandidat.

Faktor ekonomi menjadi landasan bagi masyarakat dalam menerima Money Politics yang ditawarkan oleh calon kandidat. Hal tersebut sejalan dengan teori perilaku dalam pendekatan rasional dimana dalam hal ini, masyarakat akan memilih jika merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan keuntungan dari kandidat maka ia tidak akan memilih kandidat tersebut.

Sehingga secara tidak langsung faktor inilah yang membuat Money Politic menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang tanpa memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu tindakan jual beli suara merupakan tindakan pelanggaran hukum. Yang terpenting bagi masyarakat adalah bahwa mereka mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mayoritas masyarakat desa Karama merupakan masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah dimana kebanyakan dari masyarakat tidak memiliki penghasilan yang tetap dalam sebulunya dan berprofesi sebagai petani dan peternak.

Faktor ekonomi merupakan landasan bagi masyarakat untuk turut menerima Money Politics yang ditawarkan oleh calon kandidat hal ini sejalan dengan teori perilaku dalam pendekatan rasional dimana dalam konteks pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya.

Hal ini diperjelas oleh salah satu masyarakat sebagai penerima money politic:

'saya siapa-siapa kasihka uang itu kuterima, karena berapa lagi itu kalau uang 200 ribu lumayan banyak itu untuk saya bisaka lagi pake beli beras dan uang jajannya anak-anak. Lumayanmi untuk makanku sama keluarga selama beberapa hari, karena kalau petani itu kasihan tidak tiap hari dapat uang ada musimnya'³⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Muliana yang merupakan ibu rumah tangga yang memiliki 5 orang anak yang suaminya bekerja sebagai buruh harian dengan gaji yang tidak menentu, tergantung ada tidaknya pekerjaan yang diterima:

"Saya senang sekalika kalau ada kasihka uang atau barang biar menurut orang tidak seberapa tapi saya tidak mauka tolak namana rejeki, karena kalau gajinya suamiku kuharap kodong berapa tonji na tidak tiap hari ada orang panggilki kerja baru banyak anak mau dibiayai"³⁷

³⁶ Wawancara dengan Riska penerima money politic 28 April pukul 16: 28

³⁷ Wawancara dengan Muliana penerima money politic 28 April pukul 19:15

Masalah ekonomi memang menjadi faktor yang paling utama masyarakat desa Karama mau menerima money politic dan menukarkan hak suaranya dengan uang.

5.2.2. Faktor tradisi atau kebiasaan

Dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh responden sangat jelas bahwa money politik dalam pilkades di desa karama diterima dengan baik oleh masyarakat desa karama. Hal tersebut terbukti dari apa yang diterima oleh masyarakat dari kedua kandidat tanpa ada sanggahan maupun keritikan dari masyarakat. Jika dilihat secara positif maka keduanya memiliki keterkaitan yang saling menguntungkan, dimana kandidat memperoleh dukungan dari masyarakat melalui money politic dan masyarakat dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhannya.

Yang menjadi alasan masyarakat menerima money politic yaitu adanya sesuatu hal yang menjadi adat di kalangan masyarakat khususnya masyarakat bugis, bahwa rejeki tidak boleh ditolak dan menerima pemberian adalah suatu bentuk penghargaan bagi orang yang memberi.

Seperti yang dikatakan salah satu masyarakat di Dusun Buhung Luara:

Money politic sebaiknya tidak dilakukan, tapi tidak bisa juga dipungkiri karena Negara kita ini adalah Negara yang berkembang karena pemikiran-pemikiran orang-orang awam dinegara kita ini semuanya rata-rata menginginkan seperti itu ada uang maka saya ikut, pandangan yang saya liat dari masyarkat. Tapi sebenarnya ini bukan politik sehat, tapi tidak bisa dihilangkan krena sudah turun temurun dan calonpun juga melakukan seperti itu, dan kebanyakan orang yang ditawarkan juga tidak mau menolak, adapun yang menolak tapi mungkin hanya 5% dari 100%³⁸

Di desa karama pola money politik sudah terjadi secara turun temurun sehingga masyarakat menganggap bahwa money politik itu merupakan hal yang wajar. money politik tidak hanya terjadi pada pemilihan kepala desa tetapi juga pada pemilihan-pemilihan yang

³⁸ Wawancara dengan Erwin salah masyarakat desa Karama pada tanggal 27 pukul 13:00

lainnya, masyarakat juga mengetahui bahwa money politik merupakan hal yang dilarang dalam pemilihan tetapi tetap menerima karena ada beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi dan juga kurangnya sosialisasi tentang money politik itu sendiri.

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa permasalahan ekonomi dan kurangnya sosialisasi politik yang dilakukan pemerintah dapat menjadi jalan masuk bagi money politic, dengan begitu masyarakat melihat hal ini sebagai peluang dalam memenuhi kebutuhan maupun kepentingannya baik secara pribadi ataupun kelompok. Dengan pengaruh ini mempengaruhi pola pikir masyarakat dan menganggap money politic sebagai kegiatan yang legal, walaupun sebenarnya money politic merupakan suatu yang ilegal. Dari semua pernyataan tersebut money politic dapat terealisasikan dengan baik di masyarakat desa karama karena pengaruh dari beberapa pernyataan informan.

BAB VI

KESIMPULAN

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat diperoleh beberapa simpulan. Dalam praktek money politic pada pemilihan kepala desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba tahun 2020 benar adanya praktek money politic di desa Karama karena sudah ada sejak dulu dan terjadi secara turun temurun, hal ini juga dikuatkan dengan adanya pernyataan dari beberapa responden.

Money politic yang terjadi pada pemilihan kepala desa Karama memiliki pola yang berbeda-beda dalam penyalurannya, baik waktu penyaluran, maupun jumlah uang yang dibagikan. Salah satu hal yang dikatakan oleh tim sukses dari Jusman bahwa dia juga melakukan money politic berupa uang, barang dan jasa yang dibagikan jauh sebelum menjelang hari H pemilihan. Dari data itu ditemukan dua pola praktik money politic, yaitu yang pertama pola money politic berbentuk uang dan yang kedua berbentuk barang dan jasa. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek money politic yaitu faktor ekonomi, faktor tradisi dan kebiasaan serta kurangnya sosialisasi politik yang dilakukan pemerintah.

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa praktek money politic di desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba tidak sesuai dengan aturan pemilu.

6.2. SARAN

Kepada para calon kepala desa sebaiknya perlu memperhatikan aspek moral agar dapat menjadi seorang pemimpin yang jujur dan layak untuk di pilih, selain itu juga agar dapat bersaing secara sehat dan berusaha dengan cara yang benar. Sedangkan kepada masyarakat umum agar dapat mengambil tindakan atau keputusan, terutama dalam hal praktek suap menyuap, agar dapat membedakan mana yang pantas dipilih.

DAFTAR PUSTAKA

1. SUMBER BUKU :

- Alfan. M, Alfian. *Menjadi Pemimpin Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Budiarjo, Mirriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Marsh David dan Gerry stoker. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. PT. Nusa Media, Bandung, 2002.
- Scrooder Peter. *Strategi Politik*. FNS, Jakarta, 2009.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Aspinall Edward dan Mada Sukmajati. 2015. *Politik Uang di Indonesia*. PolGov, Jakarta, 2015.
- Hoogerwerf, *Politikologi*. Penerbit Erlangga. Hal 44, Jakarta, 1985.
- J.H. Rapar.. *Filsafat Politik Plato*. CV. Rajawali. Jakarta Utara, 1991.
- Puspitawati, *Herein Gender dan Keluarga. ko nsep dan realita di Indonesia*. Kampus IPB Taman Kencana Bogor : PT IPB Press, 2012.
- Suwandi, Basrowidan. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Renekecipta, Jakarta, 2008.
- Jhon W. Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran edisi keempat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2016.

2. SUMBER SKRIPSI, JURNAL DAN PENELITIAN :

- Holish dkk. *"Money Politic dalam Praktik Demokrasi Indonesia"*. Jurnal Seminar Nasional Hukum. Vol 4 No. 2: Universitas Negeri Semarang.
- Mohamad Amanu. *"Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)"*. Jurnal Mahasiswa Sosiologi. Vol 1 No.2: Universitas Brawijaya Malang.
- Herawati Ratna, Rudiadi. *"Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)"*. Jurnal Law Reform. Vol 13 No.1.

Fitriyah."Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati)". Jurnal Politika. Vol.6 No.2.

H.M.Abdul Kholiq. "Perilaku Politik Transaksional(menggagas fenomena praktek politik uang dalam pemilu)". Hal.104

Haryanto. *Kebangkitan party ID : "Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia"*.Makassar: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.17 No.3. Hal.292

Andi Agustyara Marti. "Kekuatan politik perempuan pada pemilihan kepala desa(Studi Kasus : Desa Cumpiga Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Periode 2012-2018)". Skripsi, Universitas Hasanuddin,Makassar.

Simatupang Jonasmer, Muhammad Subekhan."Pengaruh politik uang dalam pemilu terhadap keberlanjutan demokrasi Indonesia. Seminar Nasional Hukum". Universitas Negeri Semarang ,Vol 4 No.3.

Kholid."Politik transaksional di aras lokal(Dinamika Rasional Choice Masyarakat Muslim pada pemilihan umum Legislatif Kabupaten Wonosobo Tahun 2020)". Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan,Skripsi:Seminar Nasional Hukum Universitas "Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia". Universitas Negeri Semarang, 2018).

Data DPT Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. 2019: Bulukumba.

3. KOMUNIKASI PRIBADI

Heruna. *Komunikasi Pribadi*. 28 april 2020.

Jusman.*Komunikasi Pribadi*. 25 April 2020.

Caing. *Komunikasi Pribadi*. 28 April 2020.

Hj Hasna. *Komunikasi Pribadi*. 23 April 2020.

Rosma. *Komunikasi Pribadi*. 26 April 2020.

Riska. *Komunikasi Pribadi*. 28 April 2020.

Nuliayana. *Komunikasi Pribadi*. 28 April 2020.

Erwin. *Komunikasi Pribadi*. 27 April 2020.

LAMPIRAN



(Wawancara dengan (H.Muh.Amin.P) Tokoh Agama desa Karama)



(wawancara dengan Hj.Hasnah Tokoh Perempuan di desa Karama)



(wawancara dengan Jusman kepala desa karama)



(wawancara dengan Haeruna kepala Dusun Lemponge)